

**POLITIK LEGISLATOR DALAM PENGUATAN *POLITICAL LINKAGE* ANGGOTA
DPRD DI MASYARAKAT
(Studi Kasus: Kota Semarang)**

Valda Dwi Lustiani & Laila Kholid Al Firdaus

Email: valdadwilustiani12@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran politik informal dalam membangun hubungan antara legislator dan masyarakat melalui pendekatan sosio-kultural. Dengan fokus pada studi kasus anggota DPRD Kota Semarang, penelitian ini menyoroti bagaimana interaksi informal, seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial dan budaya, dapat menjadi sarana efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas legislator. Politik informal memungkinkan adanya komunikasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan mekanisme formal, sehingga membantu legislator memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap aktivitas legislator di luar tugas resmi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dewan dalam kegiatan sosial dan budaya, seperti pengajian, gotong royong, dan pertemuan komunitas, berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi politik, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi akademik dalam bidang ilmu politik, komunikasi politik, dan kebijakan publik, serta memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aktor politik. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai peran teknologi dan media sosial dalam membentuk pola interaksi politik informal. Dengan demikian, politik

informal dapat terus dikembangkan sebagai instrumen demokrasi partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dan mendukung pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, serta akuntabel.

Kata Kunci: Politik Informal, Legislator, Sosio-Kultural, Political Linkage, DPRD Kota Semarang.

ABSTRACT

This research discusses the role of informal politics in building relationships between legislators and the public through a socio-cultural approach. Focusing on a case study of Semarang City legislators, this research highlights how informal interactions, such as involvement in social and cultural activities, can be an effective means of absorbing community aspirations and enhancing legislators' transparency and accountability. Informal politics allows for more flexible communication than formal mechanisms, helping legislators understand the needs of the community more deeply. The method used in this research is a qualitative approach with ethnographic method. Data collection techniques were conducted through interviews and observations of legislators' activities outside their official duties. The results show that the involvement of legislators in social and cultural activities, such as recitation, gotong royong, and community meetings, plays an important role in building public trust, increasing political participation, and ensuring that policies are more relevant to the needs of the community. This study makes an academic contribution to the fields of political science, political communication and public policy, and has practical implications for policy makers and political actors. In addition, this study opens up opportunities for further exploration of the role of technology and social media in shaping patterns of informal political interaction. Thus, informal politics can continue to be developed as an instrument of participatory democracy that encourages community involvement and supports a more inclusive, responsive, and accountable government.

Keywords: Informal Politics, Legislators, Socio-Cultural, Political Linkage, Semarang City Legislative Council.

A. PENDAHULUAN

Konsep formal dan informal menurut Stone (1989) dalam mendiskusikan rezim bermakna bahwa adanya hubungan antara institusi formal dan informal di mana penekanan pentingnya adalah dalam upaya melihat ilustrasi atau kelompok informal yang relatif stabil dengan akses terhadap sumber daya kelembagaan, sehingga memungkinkan institusi informal akan memiliki peran berkelanjutan dalam mempengaruhi pengelolaan urusan-urusan publik. Suatu keputusan pemerintah dan aturan yang berlaku didalam Lembaga formal dilindungi oleh badan negara, dan pelanggaran yang terjadi atas aturan tersebut berdampak pada munculnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Lembaga formal, atau bahkan oleh negara. Politik informal merupakan cara Lembaga memperoleh kekuasaan dan hak istimewa dengan cara menggunakan hubungan pribadi, politik informal dilakukan diluar dari prosedur yang ditetapkan dari Lembaga legislatif. Politik informal mengacu pada seperangkat aturan, norma, dan praktik yang tidak tertulis atau tidak resmi, namun tetap berperan dalam mempengaruhi cara kekuasaan dan

keputusan diambil dalam suatu kelompok, organisasi, atau negara. Politik informal mencakup berbagai macam praktik dan aktor informal yang memainkan peran penting dalam tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Praktik-praktik ini dapat melibatkan pendekatan personal, komunikasi, dan praktik-praktik budaya, dan dapat digunakan untuk memajukan kepentingan berbagai aktor, termasuk pejabat pemerintah, dan partai politik untuk membahas permasalahan yang terjadi

Menurut K. Aarts (dalam Clark, 2003), *political linkage* dipahami sebagai suatu ikatan antara warga negara, organisasi sosial, dan sistem politik. Political linkage dipahami bahwa pemerintah hanya membutuhkan responsive terhadap opini yang ada dipublik. Political linkage diartikan sebagai media yang dimana pemimpin politik bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, dan permintaan dari publik dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi representasi partai politik menyediakan beberapa jenis linkage, Clark menyebutkan ada tujuh

jenis political linkage yang disediakan oleh partai politik yaitu: Linkage partisipatoris, yakni ketika partai bertindak sebagai agensi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam politik. Linkage Electoral, yakni ketika pemimpin partai mampu mengontrol beragam elemen dari proses elektoral. *Policy responsive linkage*, yakni ketika partai bertindak sebagai agensi untuk meyakinkan bahwa pemerintahannya responsif terhadap rakyat/pemilih. Linkage klientelistik, yakni ketika partai bertindak sebagai chanel dalam pertukaran suara yang diberikan oleh pemilih. *Linkage directive*, linkage ini digunakan oleh mereka yang berada dalam public office untuk mengontrol perilaku warga. Linkage organisasional, yakni linkage yang didasarkan pada pertukaran antara elit partai dan elit organisasi yang terbukti mampu memobilisasi atau menarik dukungan organisasinya kepada partai politik. Linkage representative, yakni merujuk pada hubungan atau keterkaitan yang terjalin antara legislatif, seperti anggota DPRD, dengan masyarakat. Dalam hal ini, keterkaitan tersebut tidak hanya mencakup peran formal legislatif, tetapi juga melibatkan dimensi sosio-kultural

serta interaksi informal yang berlangsung di luar tugas resmi mereka.

Dilihat dari perspektif kajian partai politik menurut Kitschelt, *political linkage* sebagai pola hubungan antara seorang politisi dengan warga negaranya sebagai konstituennya. Ia mengidentifikasi tiga jenis *linkage* yaitu antara lain: *Linkage Klientelistik* merupakan salah satu jenis 'pertukaran' antara konstituen elektoral dengan politisi sebagai agen dalam iklim demokratik. Sehingga, *linkage klientelistik* merupakan pola hubungan yang dibangun seorang politisi dengan warga yang diwakilinya melalui cara pemberian keuntungan material agar warga yang diwakilinya itu mau memberikan dukungan terhadapnya. Pola relasi keduanya kemudian menjadi patron (politisi) klien (warga negara). Kedua *Linkage Programatik*, terbentuk karena seorang politisi membangun pola relasi dengan konstituen berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan semua warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Ketiga *Linkage Karismatik* memiliki pola relasi antara politisi dengan konstituennya yang dibangun berdasarkan pada karisma

personal politisi yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa *political linkage* (tautan politik) saling terkait dengan organisasi secara kelembagaan memiliki fungsi dalam menjangkakan suatu kepentingan yang sifatnya politis seperti partai politik maupun Lembaga lainnya yang berkaitan dengan fungsi politik. Dalam teori dasar demokrasi, adanya *political linkage* dipahami sebagai tautan antara partai politik dengan para pemilihnya, kemudian antara parlemen dengan para pemilihnya.

Keterhubungan politik atau *political linkage* di Kota Semarang memiliki peran krusial dalam memperkuat demokrasi dengan menjalin komunikasi antara masyarakat dan aktor-aktor politik, seperti partai politik, legislator, serta pemerintah daerah. Melalui mekanisme ini, aspirasi serta kebutuhan warga dapat tersampaikan secara lebih efektif, baik melalui diskusi publik, pertemuan langsung, maupun platform digital yang tersedia. Selain itu, keterhubungan politik berfungsi untuk memperkuat keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih selaras dengan kondisi serta permasalahan nyata di lapangan. Keberadaannya juga

mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai proses politik, seperti pemilu, musyawarah pembangunan, serta perumusan kebijakan publik, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Selain meningkatkan partisipasi, *political linkage* juga berperan dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya keterhubungan ini, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi kinerja wakil rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi publik. Lebih jauh, hubungan yang baik antara masyarakat dan pemangku kebijakan juga berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas sosial dan politik di Kota Semarang, karena tumbuhnya kepercayaan serta keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberlanjutan keterhubungan politik yang kuat menjadi aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan demokratis, sekaligus membangun hubungan yang harmonis serta berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah.

Pendekatan sosio-kultural merupakan salah satu faktor penting yang perlu diterapkan oleh legislator dalam menjalankan tugasnya, karena membantu mereka memahami secara lebih mendalam kondisi sosial dan budaya masyarakat yang diwakilinya. Dengan pendekatan ini, legislator dapat mempererat hubungan dengan masyarakat, memahami nilai-nilai yang dijunjung, serta merancang kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan warga. Legislator yang mengadopsi pendekatan sosio-kultural tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mudah diterima dan diterapkan di masyarakat.

Pendekatan ini memungkinkan legislator untuk lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat melalui interaksi langsung, keterlibatan aktif, dan dialog terbuka dengan berbagai kelompok sosial. Dengan memahami berbagai persoalan dari sudut pandang sosio-kultural, legislator dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, adil, serta sesuai dengan karakteristik sosial

masyarakat setempat. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan pendekatan sosio-kultural dalam proses legislasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap kehidupan sosial dan budaya memungkinkan legislator menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Indonesia memiliki lembaga negara yang dibagi menjadi tiga yaitu Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang yakni DPR, DPD, MPR. Lembaga Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang yakni Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hak dan tugas yang dimiliki

oleh DPR merupakan hak yang diberikan oleh konstitusi sebagai pelaksanaan dalam menjalankan fungsi DPR, tugas yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mengawasi pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan menunjukkan untuk kepentingan rakyat. Selain itu DPR memiliki 3 bidang utama yaitu fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Tujuan dibentuknya Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu berfungsi sebagai bagian fundamental sistem pemerintahan demokratis di Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk menjaga prinsip demokrasi, serta menjalankan fungsi perwakilan dengan cara mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat memiliki harapan yang besar pada efektivitas DPR RI dalam mewujudkan amanat demokrasi di Indonesia. Namun jangkauan DPR RI untuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat Indonesia kurang efektif dan tidak berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, maka dari itu terbentuklah DPRD Provinsi dan DPRD

Kota atau Kabupaten. Dengan demikian, DPRD Kota atau Kabupaten bertindak sebagai wakil rakyat yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan anggaran daerah, serta menjaga kepentingan rakyat yang diwakilinya terkhusus di kota atau kabupaten tersebut.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPRD Kota Semarang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 juga berlaku pada DPRD Kota Semarang. Berdasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Kota Semarang. Dalam pasal 9 ayat 1 jumlah anggota DPRD berjumlah 50 orang dari partai politik berbeda, yang menduduki adalah Fraksi PDIP berjumlah 19 anggota, Fraksi Gerindra 6 anggota, Fraksi Demokrat 6 anggota, Fraksi PKS 6 anggota, Fraksi Golkar dan Nasdem 6 anggota, Fraksi PKB 4 anggota, serta Fraksi PAN dan PSI 4 anggota. Keanggotaan DPRD disahkan dengan Keputusan Gubernur yang sesuai dengan laporan KPUD Kota Semarang yang disampaikan melalui Walikota. Penataan Daerah Pemilihan (Dapil)

merupakan bagian penting untuk menjaga prinsip demokrasi yang kuat dan memudahkan lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Anggota DPRD memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang ditentukan KPU dan penempatannya ditentukan oleh partai politik, Kota Semarang memiliki 6 dapil yang meliputi Dapil 1 Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Dapil 2 Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Dapil 3 Tembalang, Candisari, Dampil 4 Gajahmungkur, Banyumanik, Gunungpati, Dapil 5 Mijen, Ngaliyan, Tugu, Dapil 6 Semarang Barat, Semarang Selatan. DPRD Kota Semarang memiliki 3 komisi yang tugas dan cara kerjanya berbeda, seperti Komisi A yang bermitra dengan Pertahanan Hukum berkaitan dengan Camat, Lurah, dan Pemerintahan, Komisi B membahas mengenai budgeting anggaran pendapatan daerah yang bermitra dengan Dinas Penghasil, Bapenda, Komisi C pertanggung jawab mengenai infrastruktur pembangunan meliputi jalan dan jembatan, Komisi D melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.

Seorang anggota DPRD memiliki kewajiban untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah, mendahulukan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadinya. Komitmen seorang politikus bukan semata-mata hanya untuk uang, keuntungan dan kesenangan, tetapi karena ingin menjalankan tugasnya, dan menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Jika diamati dari cara berinteraksi anggota dewan dengan masyarakat, mereka memiliki cara masing-masing untuk membangun citra sebagai seorang anggota dewan. Pada zaman sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, anggota dewan banyak yang menggunakan sosial media yang berisi konten vlog, supaya lebih dikenal oleh banyak masyarakat, namun dengan begitu tidak cukup membuat masyarakat percaya akan apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Sebagai anggota dewan mereka harus turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi masyarakatnya, cara yang digunakan biasanya melakukan pertemuan dengan masyarakat diluar dari jam kerja mereka, seperti mengadakan sesi diskusi dirumah untuk mendengarkan aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat, bisa juga

dengan cara mereka mendapatkan undangan acara seperti wayangan dari suatu daerah dengan seperti itu akan membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan anggota dewan tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh anggota dewan dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat, dengan begitu kedua pihak akan mendapatkan keuntungan. Dengan cara melakukan pendekatan dan bersosialisasi dengan masyarakat, anggota dewan akan mendapatkan kepercayaan lebih dari banyak warga, namun sebagai anggota dewan juga harus menerima jika mendapatkan kritik dari masyarakat serta harus menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, lalu dibahas pada saat rapat dengan sesama anggota dewan. Hal itu sangat efektif dan efisien digunakan, selain itu tidak menyulitkan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan tentang aspal jalan, lampu jalan, dan lain sebagainya, namun masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai dengan dapil dewan tersebut.

Berdasarkan penggambaran terhadap beberapa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel dan bermula pada permasalahan yang terjadi

pada Anggota DPRD Kota Semarang dalam menjalankan tugas sebagai seorang legislator diluar dari jam kerja yang dimiliki, dengan cara melakukan pertemuan dengan masyarakat yang diadakan dirumah anggota dewan atau dengan cara memenuhi undangan-undangan dari kelompok masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini rencananya akan menyatukan antara masyarakat dengan Anggota DPRD Kota Semarang untuk meyakinkan masyarakat Kota Semarang bahwa dapat dengan mudah dalam melakukan penyampaian aspirasi yang dimiliki masyarakat, namun penyampaian aspirasi yang lebih efektif dilakukan dengan cara menyesuaikan daerah pemilihan anggota dewan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: Berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengulas, dan menganalisis perilaku legislator dalam *political linkage*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif etnografis untuk menjelaskan dan menganalisis “Politik Ligislator Dalam Penguatan *Political Linkage* Anggota DPRD di Masyarakat Studi Kasus: Kota Semarang”. Penelitian kualitatif etnografi berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Penelitian etnografi berfokus pada suatu masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data tetapi juga mencari keterkaitan antara variabel yang ada dan kemudian di diskripsikan. Penelitian ini ditujukan untuk meriset tugas, kewajiban, dan wewenang legislator dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural dan tautan politik secara detail.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pendekatan Sosio Kultural Legislator

Pendekatan sosio-kultural oleh legislator merupakan strategi untuk memperkuat legitimasi politik dan memastikan kebijakan selaras dengan aspirasi masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan adat, keagamaan, dan festival budaya,

yang mencerminkan komitmen legislator terhadap pelestarian budaya serta solidaritas dengan komunitas yang diwakili.

a. Peran Budaya Dalam Politik Informal

Budaya memiliki peran krusial dalam politik informal dengan membentuk pola interaksi sosial, nilai, dan norma yang memengaruhi hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Melalui budaya, legitimasi seorang legislator dapat diperkuat dengan penggunaan simbol, ritual, serta tradisi yang mendukung otoritas politik mereka. Keterlibatan aktif dalam kegiatan budaya juga memberikan kesempatan bagi legislator untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat serta menyerap aspirasi mereka secara langsung.

Berbagai tradisi lokal, seperti sedekah bumi, trilapan, dan haul kiai, menjadi wadah efektif dalam mempererat hubungan antara legislator dan konstituennya. Tradisi ini tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang lebih akrab dibandingkan forum resmi. Dalam acara-acara

tersebut, masyarakat merasa lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan, harapan, serta gagasan mereka kepada para legislator. Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan budaya memungkinkan legislator memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik serta merumuskan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai lokal.

Efektivitas budaya dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemimpin juga terlihat dalam berbagai kegiatan informal seperti sarasehan, pengajian, pertemuan komunitas, dan arisan. Acara semacam ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan pemimpin tanpa terikat oleh formalitas yang kaku. Bagi kelompok tertentu, seperti perempuan, kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari cenderung lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dengan demikian, interaksi yang terjalin dalam kegiatan budaya tidak hanya memperkuat hubungan antara legislator dan masyarakat tetapi juga membantu dalam proses pengambilan keputusan politik yang lebih inklusif.

Selain sebagai alat komunikasi politik, budaya juga berfungsi dalam menjaga identitas dan nilai-nilai masyarakat. Tradisi yang terus dipelihara dapat memastikan bahwa perubahan sosial dan pembangunan tetap berjalan selaras dengan kearifan lokal. Penyampaian informasi mengenai program pemerintah melalui kegiatan budaya terbukti lebih efektif, karena masyarakat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan dalam konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Selain itu, interaksi yang terjalin dalam acara budaya dapat menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan meminimalkan potensi konflik atau kesalahpahaman antara masyarakat dan pemimpin. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya dalam politik informal harus terus dikembangkan agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin harmonis serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

b. Hubungan Sosio Kultural Dalam *Political Linkage* di Semarang

Keterkaitan sosio kultural memainkan peran krusial dalam *political linkage* atau hubungan politik di

Semarang, di mana interaksi sosial dan budaya menjadi sarana utama dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan legislator. Melalui tradisi lokal, norma sosial, serta nilai budaya yang mengakar, legislator dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif dibandingkan metode formal. Pendekatan ini dilakukan melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, seperti pengajian, olahraga bersama, gotong royong, serta acara adat yang menciptakan ruang komunikasi lebih santai dan terbuka.

Political linkage yang berbasis sosio-kultural memungkinkan legislator menyerap aspirasi masyarakat dengan lebih dekat dan personal, sekaligus meningkatkan kepercayaan serta legitimasi politik mereka. Legislator yang aktif hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik dalam acara resmi seperti reses maupun dalam momen sosial seperti pernikahan atau kegiatan keagamaan, dianggap lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Selain itu, pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, atau etnis turut

memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, legislator tidak hanya mempererat hubungan emosional, tetapi juga memastikan kebijakan yang dibuat selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Hal ini mencerminkan bahwa komunikasi politik tidak hanya bergantung pada lembaga formal, tetapi juga pada jaringan sosial yang lebih fleksibel dan dinamis, yang pada akhirnya mendukung stabilitas sosial serta keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.

c. Politik Informal Dalam Legislasi Di Masyarakat

Politik informal dalam proses legislasi mengacu pada interaksi antara legislator dan masyarakat di luar mekanisme resmi pemerintahan, seperti dalam acara kebudayaan, kegiatan sosial, atau diskusi santai. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan kebutuhan mereka secara lebih terbuka tanpa terbebani prosedur birokrasi. Legislator yang aktif dalam kegiatan sosial, seperti pengajian, gotong royong, dan pertemuan komunitas, dapat lebih memahami kondisi nyata masyarakat dan meresponsnya dengan cepat.

Pendekatan informal terbukti lebih efektif dibandingkan jalur formal dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Masyarakat merasa lebih nyaman berbicara dalam suasana yang santai, sementara legislator dapat memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat dengan memperlihatkan kepedulian dan keterlibatan langsung. Namun, meskipun memiliki dampak positif dalam meningkatkan partisipasi publik dan efektivitas komunikasi, pendekatan informal juga berisiko mengurangi transparansi dan membuka peluang praktik patronase jika tidak diawasi dengan baik.

Oleh karena itu, keseimbangan antara pendekatan formal dan informal diperlukan agar proses legislasi tetap responsif, inklusif, dan akuntabel. Legislator perlu memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam interaksi informal benar-benar diakomodasi dalam kebijakan, bukan sekadar didengar tanpa tindak lanjut. Dengan demikian, politik informal dapat menjadi sarana efektif dalam membangun pemerintahan yang lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Penguatan Linkage Legislator dan Konstituen

Hubungan antara legislator dan konstituen (linkage) merupakan aspek fundamental dalam demokrasi. Penguatan linkage ini penting untuk memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam kebijakan. Salah satu cara efektif adalah dengan meningkatkan komunikasi langsung melalui reses, forum diskusi, dan pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial. Selain itu, legislator perlu menunjukkan komitmen nyata dengan memperjuangkan isu-isu lokal serta membuka ruang konsultasi publik agar masyarakat merasa memiliki andil dalam kebijakan.

Pendekatan yang mengayomi dan merangkul masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Legislator tidak hanya harus menjalankan tugas secara formal, tetapi juga memahami kondisi rakyat dengan empati dan kepedulian. Kegiatan sosial seperti pengajian rutin berperan dalam mempererat hubungan sosial serta menjadi wadah diskusi dan penyelesaian masalah bersama. Selain itu, dialog informal seperti pertemuan santai

memungkinkan warga menyampaikan aspirasi dengan lebih leluasa dan meningkatkan transparansi dalam pembuatan kebijakan.

Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) GP Ansor juga menjadi sarana penting dalam memperkuat keterhubungan antara legislator dan pemuda, membuka ruang komunikasi langsung, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Dengan keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan diskusi, legislator dapat membangun sinergi yang lebih erat dengan masyarakat serta memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

3. Peluang Politik Informal dalam Masyarakat

Politik informal merupakan interaksi di luar struktur resmi pemerintahan yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Legislator dapat memanfaatkannya dengan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan tokoh lokal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pertemuan langsung, seperti dialog

warga dan acara adat, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, legislator berperan dalam edukasi politik guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi.

Politik informal juga menciptakan ruang negosiasi dan kompromi, memastikan kebijakan lebih inklusif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tokoh informal, seperti pemimpin agama dan adat, menjadi penghubung antara warga dan pembuat kebijakan. Fleksibilitas politik informal memungkinkan respons cepat terhadap perubahan situasi. Namun, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Interaksi informal, seperti pertemuan santai (srawungan), membantu masyarakat menyampaikan aspirasi secara lebih terbuka. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara legislator dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan inklusif.

4. Peran Legislator dalam kegiatan Sosial dan Masyarakat

Legislator memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan informal, diskusi, dan kunjungan komunitas. Kehadiran mereka di tengah masyarakat menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan yang lebih relevan dan inklusif.

Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial mempererat hubungan antara legislator dan konstituen, menciptakan rasa kedekatan dan kepedulian. Masyarakat merasa dihargai ketika aspirasi mereka didengar, yang memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap wakil rakyat. Selain itu, interaksi langsung ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan memperkaya demokrasi.

Legislator juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan tokoh lokal untuk mendapatkan informasi serta masukan yang membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Partisipasi dalam kegiatan sosial

dan budaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

Secara keseluruhan, keterlibatan legislator dalam kehidupan sosial mempererat hubungan dengan masyarakat, memastikan kebijakan lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kredibilitas dan legitimasi mereka sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

5. Refleksi Temuan Penelitian

Penelitian ini menyoroti peran politik informal dalam membangun hubungan antara pemimpin dan konstituen. Politik informal, yang sering diabaikan dalam kajian politik konvensional, terbukti memiliki dampak besar dalam membangun legitimasi politik, menyerap aspirasi rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Temuan utama menunjukkan bahwa hubungan politik tidak hanya terbentuk melalui mekanisme formal seperti kampanye, tetapi juga melalui interaksi sosial, budaya, dan komunitas lokal. Politik informal memungkinkan komunikasi politik yang lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan, memberikan

ruang bagi kelompok yang kurang terwakili, serta memperkuat representasi politik. Selain itu, politik informal berperan dalam pembuatan kebijakan publik yang lebih responsif dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Studi ini juga menantang pandangan tradisional kepemimpinan politik, dengan menekankan pentingnya relasi sosial di luar institusi formal.

Penelitian ini membuka peluang studi lanjutan tentang variasi politik informal dalam berbagai konteks, termasuk dampak positifnya terhadap partisipasi politik dan risikonya terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan implikasi praktis dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif, demokratis, dan akuntabel.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik informal yang berbasis pendekatan sosial dan budaya memiliki peran krusial dalam membangun kedekatan antara legislator dan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas sosial,

budaya, dan keagamaan, legislator dapat lebih mudah memahami serta menyerap aspirasi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat legitimasi politik mereka. Interaksi langsung dalam forum-forum informal seperti pengajian, gotong royong, sedekah bumi, serta pertemuan komunitas menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif, sehingga memungkinkan kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti perempuan, pemuda, dan komunitas adat, untuk turut berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan kebijakan.

Politik informal terbukti menjadi sarana komunikasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan mekanisme formal. Selain membantu legislator memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat, pendekatan ini juga memastikan bahwa kebijakan yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Lebih dari sekadar alat komunikasi, politik informal merupakan bagian dari sistem representasi politik berbasis sosial dan budaya yang, jika digunakan dengan baik, dapat meningkatkan transparansi

pemerintahan serta memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja legislator. Namun, adanya risiko seperti praktik patronase dan nepotisme tetap harus dikelola dengan seimbang agar politik informal tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi politik informal dalam membangun hubungan yang kuat antara legislator dan konstituen. Legislator yang mampu menerapkan pendekatan ini secara etis dan profesional akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keberlanjutan praktik politik informal ini dapat berkontribusi pada efektivitas pemerintahan sekaligus memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Selain memberikan kontribusi akademik di bidang ilmu politik, komunikasi politik, dan kebijakan publik, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aktor politik. Studi ini membuka peluang riset lebih lanjut terkait politik informal dalam

berbagai konteks sosial, baik dalam sistem demokrasi maupun otoriter, serta bagaimana kemajuan teknologi dan media sosial memengaruhi pola interaksi politik informal. Dengan demikian, politik informal dapat terus dikembangkan sebagai instrumen demokrasi partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat serta mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel.

F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas politik informal dalam mempererat hubungan antara legislator dan masyarakat:

1. Legislator disarankan untuk lebih aktif terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat melalui kegiatan budaya, keagamaan, dan sosial guna membangun hubungan yang lebih dekat dengan konstituen, serta menerapkan politik informal penting bagi legislator untuk tetap mengutamakan prinsip transparansi

dan akuntabilitas agar terhindar dari praktik patronase atau nepotisme.

2. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyuarkan aspirasi mereka melalui berbagai forum informal seperti pengajian, arisan, dan kegiatan gotong royong, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi dengan legislator, selain itu pendidikan politik bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi serta dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik.
3. Pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana komunikasi interaktif perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki akses lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan, sekaligus mendorong sikap kritis dalam menilai kinerja legislator sehingga keterlibatan dalam politik informal tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan Masyarakat.

- Ananto Yudono, A. A. (2016). Perspektif Sosio-Kultural: Sebuah Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Makassar . *Journal JPE*.
- Arditama, E. (2013). Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural: Inspirasi dari Kota Yogyakarta . *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- CORNELIS LAY, D. M., & Prof.Dr. Pratikno, M. S. (2015). TAUTAN POLITIK (POLITICAL LINKAGE) ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DAN PARLEMEN DI INDONESIA (STUDI KASUS TAUTAN POLITIK DALAM PEMBUATAN UU PORNOGRAFI, UU
- Devy Dhian Cahyati, D. R. (2019). Women Leader and Political Linkage: Case Studies in Kutai Kertanegara and Bolaang Mongondow. *Jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Fauziah Nasution¹, M. S. (2023). Keragaman Sosio Kultural Masyarakat. *Journal Lokarya* .
- Hidayat, R. (2018). Perilaku Politik Dan Pemilu Legislatif Studi Terpilihnya Yandri Susanto Sebagai Anggota DPR RI Dapil II Banten Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2014. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Hutagalung. (2020). POLITICAL LINKAGE TIAHJA WANDAWA DENGAN GEREJA KRISTEN INDONESIA SION DAN GEREJA GERAKAN PENTAKOSTA EBEN HAEZER PADA PILEG 2019 DI KOTA TASIKMALAYA. Repositori Universitas Siliwangi.
- Irm Yunika, E. L. (2023). Pelaksanaan Demokrasi Kekuasaan Politik Yang Informal Dan Tidak Bisa Diatur. *Jurnal Pendidikan Transformatif*.
- Indonesia. (2022). Survei Perilaku Pemilih dan Linkage Politik. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik Universitas Gajahmada.
- Indonesia. (2014). UUD No 17 Tahun 2014. Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia : <https://dpr.go.id>
- Köllner, P. (2006). Formal and Informal Politics from an Institutional Perspective: An Analytical Approach for Comparative Area Studies. SSRN.
- Nugrahani, S. M. (2018). FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
- Prof. Dr. Cornelis Lay, M. (2017). Tautan Politik antara Pengrajin Batik, Parlemen, dan Masyarakat Sipil di Yogyakarta. Universitas Gajahmada Expertise.
- Redho Rama Putra, A. A. (2022). Anak Nagari dan Kekuasaan: Relasi Kekuasaan Informal Dalam Konflik Penguasaan Sumber Ekonomi Di Kecamatan Pauh. *Jurnal sosial Budaya Syar'i*.
- Adianto, & As'ari, H. (2016). Peran Dprd Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *PUBLIKa*, 2(1), 30–47.

- BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2022-2023*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang. <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Bramantyo, R. Y., & Kusumaningrum, D. (2024). Peran Pemimpin Informal dalam upaya pemberdayaan Ekonomi Komunitas Kerajinan Lokal Bali. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1(1), 253–262. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3649>
- Fajri, A. (2017). Peranan Pemimpin Informal dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2014). *Jom Fisip*, 4(1), 0–9.
- Hadi, O. H. (2010). Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi. *Makara Sosial Humaniora*, 14(2), 117–129. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.674>
- Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 171. <https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14>
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Rinenggo, A. (2022). Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia. *Waspada: Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, 10(01), 1. <https://doi.org/10.61689/waspada.v10i01.308>
- Saleh, K., & Munif, A. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi. *Addin*, 9(2), 309–332.
- Sobari, W. (2022). Logika Politik Transaksional Petahana Dalam Pilkada: Analisis Pembelahan Politik. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 13–24. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.167>
- TIK UB. (2014). *Wawan Sobari: Politik Informal Berperan Kuat dalam Pilkada*. Prasetya UB. <https://prasetya.ub.ac.id/wawan-sobari-politik-informal-berperan-kuat-dalam-pilkada/>
- Wahidin, A., Azis, A., A, D., & P, T. (2017). Pemimpin Informal dan Dinamika Sosial (Studi Kasus Lima tokoh Di Desa Allu Taroawang Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 7(2), 169–182.